

Nomor : S-10/EP.11/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan Perubahan Periode  
Penyampaian Laporan Layanan  
Pengaduan kepada Otoritas Jasa  
Keuangan Melalui Sistem Pelaporan  
Edukasi dan Perlindungan Konsumen  
(SIPEDULI)

04 April 2024

Yth. Pengurus Asosiasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (Penerima Terlampir)  
di tempat

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK PKM SJK) yang antara lain mengatur terkait penyampaian Laporan Layanan Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan periode penyampaian Laporan Layanan Pengaduan kepada OJK melalui Sistem Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI) yang semula secara triwulanan menjadi semesteran.
2. Laporan Layanan Pengaduan disampaikan kepada OJK secara semesteran yaitu paling lambat tanggal 10 Juli dan 10 Januari. Dalam hal tanggal 10 Juli atau 10 Januari jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur, maka Laporan Layanan Pengaduan disampaikan kepada OJK paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
3. Dalam penyampaian Laporan Layanan Pengaduan secara semesteran, saat ini OJK sedang melakukan beberapa penyesuaian pada sistem SIPEDULI. Untuk menjaga agar proses penyampaian Laporan Layanan Pengaduan kepada OJK berjalan tertib dan lancar, maka OJK akan melakukan penutupan akses penyampaian Laporan Layanan Pengaduan triwulan I 2024 dan selanjutnya Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) agar menyampaikan laporan triwulan II 2024 dengan data yang mencakup Januari s.d. Juni 2024.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-020424-017669

4. Bagi PUJK yang belum menyampaikan Laporan Layanan Pengaduan triwulan sebelum tahun 2024, masih dapat menyampaikan Laporan Layanan Pengaduan secara triwulan kepada OJK melalui SIPEDULI.

Untuk itu, kami mengharapkan bantuan Saudara/i untuk menginformasikan hal tersebut di atas kepada seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan anggota masing-masing asosiasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Departemen Pelindungan  
Konsumen



Rudy Agus P. Raharjo

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen
2. Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto
3. Kepala Departemen Pengawasan Konglomerasi Keuangan
4. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan Perbankan Daerah
5. Kepala Departemen Pengawasan Bank Pemerintah
6. Kepala Departemen Pengawasan Bank Swasta 1
7. Kepala Departemen Pengawasan Bank Swasta 2
8. Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang
9. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Khusus
10. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
11. Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional
12. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek
13. Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik
14. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek
15. Kepala OJK Provinsi Jawa Barat
16. Kepala OJK Jabodebek dan Provinsi Banten

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-020424-017669

17. Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah
18. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur
19. Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
20. Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
21. Kepala OJK Provinsi Bali
22. Kepala OJK Cirebon
23. Direktur Pengawasan LJK
24. Plt. Kepala OJK Provinsi Riau
25. Plt. Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan
26. Kepala OJK Daerah Istimewa Yogyakarta
27. Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara
28. Kepala OJK Provinsi Lampung
29. Sdr/i. Guntar Kumala selaku Plt. Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat
30. Plt. Kepala OJK Malang
31. Kepala OJK Solo
32. Kepala OJK Tegal
33. Kepala OJK Purwokerto
34. Kepala OJK Kediri
35. Kepala OJK Jember
36. Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau
37. Kepala OJK Provinsi Aceh
38. Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah
39. Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tenggara
40. Kepala OJK Provinsi Maluku
41. Kepala OJK Papua
42. Kepala OJK Provinsi Jambi
43. Kepala OJK Provinsi Bengkulu
44. Kepala OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat
45. Kepala OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur
46. Kepala OJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
47. Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat
48. Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah
49. Sdr/i. Irawan Muzhar selaku Plt. Kepala OJK Tasikmalaya

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.





LAMPIRAN SURAT DINAS  
Kepala Departemen Pelindungan  
Konsumen

Nomor : S-10/EP.11/2024  
Tanggal : 04 April 2024

1. Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA)
2. Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS)
3. Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)
4. Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO)
5. Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO)
6. Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia (Perbina)
7. Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII)
8. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)
9. Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI)
10. Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan
11. Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI)
12. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
13. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
14. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)
15. Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (AAJSI)
16. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)
17. Asosiasi Modal Ventura Indonesia
18. Asosiasi Modal Ventura Indonesia untuk Startup Indonesia (Amvesindo)
19. Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO)
20. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)
21. Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI)
22. Dewan Asuransi Indonesia (DAI)
23. Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI)
24. Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH)
25. Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI)
26. Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana Indonesia (ABAPERDI)
27. Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI)

Kepala Departemen Pelindungan Konsumen

Rudy Agus P. Raharjo

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-020424-017669